



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN
2025

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN
2025

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Raya Parigi Karangbenda Parigi-Pangandaran
Fax/Telp. (0265) 2640200 Email: distanpangandaran@yahoo.com

Kode Pos 46393

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.-879/DISTAN-I/VII/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 42), Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);

46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 57);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 42)
50. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.-1505/DISTAN-I/X/2022 Tentang Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Distan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud UU Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman, UU Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU Nomor . 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Kepala Dinas Pertanian adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Dinas Pertanian.
3. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pertanian adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun 2021 sampai dengan 2026.
4. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanian untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan Sistematika Sebagai Berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian
- 3.3.. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian

Bab V Penutup

BAB III
ISI DAN URAIAN KERJA
Pasal 3

Isi dan uraian Renja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal, 25 Juli 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN,



YADI GUNAWAN, S.Hut., MM

NIP. 19750518 200901 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pangandaran
2. Wakil Bupati Pangandaran
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Illahi Rabbi karena atas perkenan-Nya penyusunan RENJA Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan.

RENJA Dinas Pertanian tahun 2025 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk tahun 2025, yang disusun antarlain berdasarkan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) ditingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, RENJA ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pertanian harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*betterperformance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian.

Pangandaran, 25 Juli 2024
Kepala Dinas

YUSUF UNAWAN, S.Hut.,MM

NIP. 19750518 200901 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN	
 LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan	
Capaian Renstra Dinas Pertanian	12
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten	
Pangandaran	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	
Pertanian.....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN.....	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian.....	27
3.3 Program dan Kegiatan.....	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS	
 PERTANIAN.....	32
BAB V PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	37



- Tabel T-C.29.
- Tabel T-C.30.
- Tabel T-C.31.
- Tabel T-C.32.
- Tabel T-C.33.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
3. Penyusunan Renja SKPD merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian penyusunan APBD.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mengimplementasikan pelaksanaan Sinergi antara kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan yang Spesifik, terukur dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan ketepatan waktu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,



- Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 57);



47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
49. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 42)
50. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.-1505/DISTAN-I/X/2022 Tentang Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Distan ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari s.d Desember 2025 dan dalam pelaksanaannya terdapat kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 adalah untuk:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan tahun 2025;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
- c. Supaya dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pertanian, agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, serta Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja .

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian

Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan uraian program dan kegiatan Dinas Pertanian pada tahun rencana yang dilengkapi dengan lokasi dan indikasi pendanaan yang dibutuhkan- berdasarkan sumber dana APBD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian

Evaluasi pelaksanaan kegiatan merupakan tahap penting untuk memperoleh input dalam menyusun perencanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pertanian dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran selama tahun 2023.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.29. (terlampir).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Capaian Produksi Padi cukup berhasil walaupun peningkatan produksinya hanya sebesar 0,67% dari tahun 2022 produksinya sebesar 209.947,36 ton. Peningkatan produksi yang tidak begitu signifikan dikarenakan adanya pergeseran jadwal tanam renentak dari bulan september ke bulan November dan Desember sehingga panen padi dilaksanakan paada bulan Maret dan April pada tahun 2023 di teruskan dengan kondisi iklim khususnya musim kemarau panjang. Produksi Jagung pada tahun 2023 sebanyak 343,67 ton atau mengalami kenaikan sekitar 369,28 ton atau setara dengan 7,45%. Peningkatan ini terjadi karena adanya cuaca musim kemarau yang mendukung tanaman jagung yang berproduksi dan kesesuaian pemilihan varietas benih jagung yang ditanam. Capaian Produksi Kedelai mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 272,36 % dari produksi 2022. Peningkatan Produksi yang cukup signifikan ini disebabkan adanya bantuan dari pemerintah provinsi yang dengan Pembantuan dengan tanam kedelai 400 Ha dan didukung oleh kondisi musim kemarau yang mendorong meningkatnya produksi kedelai serta kesesuaian dengan ketersediaan benih kedelai. Untuk tanaman sayuran juga banyak mengalami penurunan produksi adalah buncis, komoditi tidak dihasilkan oleh petani akibat kemarau panjang yang mempengaruhi tanaman. Sayuran dari jenis cabe merah mengalami peningkatan sebesar 81,48% atau 294, 90 ton dari tahun 2022, cabe rawit mengalami peningkatan produksi mencapai 31,35% atau 134,90 ton sedangkan tomat mengalami peningkatan produksi sebesar 128,36% atau 62,80 ton. Peningkatan ini di picu oleh tingginya permintaan pasar, harga pasar dan kondisi iklim yang memungkinkan tanaman perproduksi dengan baik. Sedangkan untuk tanaman biofarmaka khususnya komoditi kapulaga mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar dibawah 27,69% atau 1.075,30 ton dari 2022 sebesar 1.487,06 ton. Untuk komoditi jahe sama halnya dengan kapulaga mengalami penurunan produksi sebesar dibawah 27,71% atau 155,14 ton dari 8,12 ton. Kemudian untuk komoditi laos, hanya mengalami peningkatan produksi sebesar 33,62% atau 10,85 ton dari tahun 2022 dan komoditi kencur mengalami peningkatan produksi 31,11% atau 42,39 ton. Penurunan dan peningkatan produksi di atas masih di pengaruhi oleh kondisi iklim (musim kemarau) yang cukup panjang dan penyebab lainnya adalah masa tanam dan panen yang berubah dan masa tanam dan



panen yang berubah dan masa panen tanam tahun 2022. Untuk tanaman buah mengalami peningkatan produksi terutama komoditi duren dan manggis yaitu mencapai produksi rata-rata sebesar 422%-645%.

Komoditi lainnya dari kegiatan pertanian yaitu ternak. Ternak besar meliputi sapi, domba, kambing dan unggas yang tersebar di semua kecamatan. Kabupaten Pangandaran belum memiliki Rumah Potong Hewan milik pemerintah yang ada tempat pemotongan hewan milik masyarakat, selain itu Kabupaten Pangandaran tidak ada yang beternak sapi perah sehingga tidak ada produksi susu. Kabupaten Pangandaran di sektor peternakan juga menghasilkan ternak unggas berupa ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik. Produksi daging sapi untuk tahun 2023 di wilayah Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan produksi. Produksi daging sapi di tahun 2023 sebesar 769,49 ton atau 8,22% dari produksi tahun lalu, hal ini di pengaruhi oleh adanya penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan penyakit lato-lato atau Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang ternak sapi sehingga banyak sapi yang di jual keluar daerah. Produksi daging kambing dan domba mengalami penurunan mencapai 15,2 ton atau mengalami penurunan sebesar 31,297% dari tahun 2022 yaitu 19,76 ton. Faktor penurunan ini di akibatkan karena menurunnya pemotongan kambing untuk hewan Qurban di 2023 dan konsumsi daging kambing menurun. Untuk produksi daging ayam ras mengalami peningkatan produksi sebesar 2.604,93 ton atau 1,24%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh harga dan permintaan konsumen, pedagang, hotel yang meningkat sehingga produksi daging ayam ras meningkat.

Areal perkebunan yang terdapat di Kabupaten Pangandaran meliputi perkebunan besar negara (PBN), perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (PR). PBN/PBS tercatat seluas 4.324,35 Ha, yang dikelola oleh PTPN Batulawang. PR merupakan lahan masyarakat yang ditanami atau dikembangkan menjadi kawasan perkebunan. Komoditi yang dikembangkan didominasi oleh komoditi kelapa seluas 25.160,99 ha dengan produksi sekitar 82.066.020 butir atau setara 13.677,67 ton , cengkeh seluas 857,05 ha dengan produksi sebanyak 146,04 ton, kakao seluas 889,93 ha dengan produksi 259,86 ton, karet seluas 669,40 ha dengan produksi 182,52 ton, pala seluas 1.358,35 ha dengan produksi 60,32 ton dan kopi seluas 613,04 ha dengan produksi 282,60 ton. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten



Pangandaran sangat potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan terutama komoditas-komoditas unggulan daerah.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	2022	2023
1.	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (ton)		
	Padi	208.556,11	209.947,36
	Jagung	343,67	369,28
	Kedele	203,01	755,93
	Durian	286,4	1495,5
	Manggis	171,3	1276,5
	Jahe	214,61	155,137
	Laos	8,12	10,85
	Kencur	32,332	42,392
	Kapulaga	1487,059	1075,299
	Cabai Merah	162,5	294,9
	Buncis	25,5	0
	Tomat	27,5	62,8
	Cabe Rawit	102,7	134,9
2.	Produksi Perkebunan (ton)		
	Kelapa	13.677,67	13.972,67
	Karet	185,52	204,22
	Cengkeh	146,04	115,94
	Pala	60,32	12,87
	Tembakau	25,97	31,23
	Kakao	259,86	241,34
	Kopi	282,6	276,4
3.	Produksi Daging (ton/thn)		
	Sapi	1127,199	769,49
	Kambing	19,716	15,2
	Domba	63,439	43,59



No	Indikator	2022	2023
	Ayam Buras	348,144	354,81
	Ayam Ras Pedaging	2.573,02	2.604,93
	Itik	17,063	17,09
	Puyuh	2,208	2,24
4.	Produksi Telur (ton/thn)		
	Ayam Buras	727,11	725,67
	Ayam Ras	2.630,46	2.828,05

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Kebijakan dan strategi dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran kedepan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal dan maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh terhadap proses pembangunan pertanian. Untuk itu pada tabel dibawah ini dapat diuraikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Tabel 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			INTENAL (KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	EKTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian	▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat ▪ Peningkatan	▪ Tingkat Produksi ▪ Tingkat Mutu Hasil ▪ Produksi Benih Bersertifikat ▪ Produksi	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fugsu lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	a. Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktvitas komoditi pertanian b. Belum optimalnya sinergitas



Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			INTENAL (KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	EKTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	
	Produksi Ternak ▪ Ketersediaan Bibit Ternak ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ▪ Ketersediaan Bibit Tanaman Perkebunan yang Bersertifikat	Bibit Ternak	c. Ketersediaan potensi SDA, SDM dan SDB dalam peningkatan produksi dan produktivitas	c. Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian d. Aksesibilitas kehilangan hasil masih tinggi	sinkronisasi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas antara Kabupaten dengan Propvinsi c. Belum optimalnya sinergitas koordinasi antara tingkat kabupaten dengan tingkat lapangan
Kajian Renstra OPD Provinsi	▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih Tanaman Pangan Bersertifikat ▪ Peningkatan Produksi Ternak ▪ Ketersediaan Bibit Ternak ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ▪ Ketersediaan Bibit Tanaman Perkebunan yang Bersertifikat	▪ Tingkat Produksi ▪ Tingkat Mutu Hasil ▪ Produksi Benih Bersertifikat ▪ Produksi Bibit Ternak	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fugsu lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktvitraas komoditi pertanian
Kajian Renstra K/L	▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Ketersediaan Benih	▪ Tingkat Produksi ▪ Tingkat Mutu Hasil ▪ Produksi	a. Kewenangan dinas dalam peningkatan produksi dan produktvitas komoditi	a. Semakin tingginyaalih fugsu lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan)	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktvitas komoditi



Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			INTENAL (KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	EKTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	
	Tanaman Pangan Bersertifikat ▪ Peningkatan Produksi Ternak ▪ Ketersediaan Bibit Ternak ▪ Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan ▪ Ketersediaan Bibit Tanaman Perkebunan yang Bersertifikat	Benih Bersertifikat ▪ Produksi Bibit Ternak	pertanian b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	pertanian
Kajian RTRW	▪ Pemanfaatan Kawasan Pertanian ▪ Alih Fungsi Lahan	Tingkat Produksi	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas pertanian
Kajian KLHS	▪ Keterbatasan lahan budidaya pertanian ▪ Terjadinya perambahan dan alih fungsi lahan dari lahan konservasi ke lahan budidaya ▪ Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Pangandaran ▪ Pemanfaatan lahan pertanian yang	Tingkat Produksi	a. Ketersediaan dukungan anggaran b. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian dan kerusakan infrastruktur jaringan irigasi	Tidak tercapainya sasaran produksi dan produktivitas komoditi pertanian



Aspek kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian
			INTENAL (KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	EKTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DINAS PERTANIAN)	
	lestari				

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran di atas, maka faktor kunci keberhasilan diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu sumber daya pertanian (SDM, SDB dan SDA).
2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian
3. Peningkatan produksi, produktivitas pertanian.
4. Peningkatan akses petani/kelompok tani ke sumber pembiayaan.
5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani
6. Peningkatan peran/kompetensi petugas lapang (POPT, PPL), dan petani/kelompok tani.
7. Perbaikan infrastruktur pertanian (jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi).
8. Peningkatan mutu hasil pertanian yang memenuhi standar dan berdaya saing.
9. Pemanfaatan peluang pasar lokal, regional dan global.
10. Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.
11. Peningkatan sinergitas antar unit kerja lingkup Dinas Pertanian.
12. Penempatan aparatur harus sesuai dengan kompetensinya.

2.3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pangandaran dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal Program 1 : Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	a. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada tupoksi c. Akses terhadap data dan informasi potensi daerah belum optimal d. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal e. Peran dan fungsi UPTD belum optimal f. Sinergitas tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya tingkat kesuburan tanah (lahan) pertanian c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi dan jalan usaha tani/produksi d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana bencana alam kekeringan / banjir e. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pendukung kegiatan) f. Menurunnya minat terhadap usahatani (pertanian, perkebunan dan peternakan) g. Kemampuan permodalan petani/nelayan terbatas h. Penerapan teknologi terbatas	a. Kewenangan dinas dalam pengembangan sektor pertanian b. Ketersediaan sumber daya pertanian c. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha d. Ketersediaan dukungan anggaran e. Keberadaan lembaga perbenihan tanaman pangan dan hortikultura f. Ketersediaan fasilitas saprodi (sarana produksi) g. Keberadaan lembaga tani dan klinik tanaman



Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Dinas Pertanian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			i. Penerapan teknologi pertanian terbatas j. Insentif peningkatan mutu masih rendah k. Daya saing produk komoditi masih rendah l. Hama dan penyakit makin berkembang m. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi (losis) n. Akses Pemasaaran Produk masih minim	

2.3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2011-2031 permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	RencanaTata	Permasalahan	Faktor
-----	-------------	--------------	--------



	Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Pelayanan Dinas Pertanian	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Budidaya	1. Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 2. Sosialisasi PP No. 1 Tahun 2009 3. Sosialisasi PP No. 2 Tahun 2011 4. Sosialisasi Permentan No. tentang penetapan kawasan	1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangandaran yang setiap tahun meningkat 2. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan untuk bangunan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan pengembangan lahan pertanian	1. Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal 2. Kebutuhan atas bahan pangan yang semakin meningkat

Berdasarkan analisis KLHS permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Keterbatasan lahan budidaya tanaman pangan dan hortikultura Terjadinya	1. Sosialisasi UU No. 41 tahun 2009 2. Sosialisasi PP No. 1 Tahun 2009 3. Sosialisasi	1. Petumbuhan penduduk Kabupaten Pangandaran yang setiap tahun meningkat	1. Pemanfaatan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjuta



No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	perambahan dan alih fungsi lahan dari lahan konservasi ke lahan budidaya	PP No. 2 Tahun 2011	2. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan untuk bangunan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pengembangan pertanian	n masih belum optimal
3.	Berkurangnya lahan kritis di Kabupaten Pangandaran	4. Sosialisasi Permentan No. tentang penetapan kawasan		2. Kebutuhan atas bahan pangan yang semakin meningkat
4.	Pemanfaatan lahan pertanian yang lestari			
5.	Menambah tingkat efek rumah kaca			

2.3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. ASPEK TEKNIS
- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

b. Alih fungsi lahan.

c. Kelembagaan tanaman pangan dan hortikultura, ternak, bibit tanaman perkebunan.
2. ASPEK EKONOMIS
- a. Ketersediaan pangan (beras/daging) di Kabupaten Pangandaran.

b. Peningkatan akses permodalan petani.

c. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian.

d. Peningkatan nilai tambah dan pendapatan petani.
3. ASPEK SOSIAL
- a. Peningkatan kemampaun kelembagaan petani.

b. Peningkatan kualitas sumber daya pertanian.

c. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar.

4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- b. Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati.
- c. Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD berisi uraian mengenai proses yang dilakukan antara awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai proses yang dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan awal RKPD terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Dinas Pertanian sebagai SKPD teknis yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan berada pada kebijakan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Review terhadap awal RKPD Tahun 2025 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2025 disajikan pada tabel T-C.31. di halaman Lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Distan didiskusikan dalam pembahasan forum gabungan SKPD kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum gabungan SKPD usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan serta penentuan prioritas program/kegiatan yang disajikan pada Tabel T-C.32. di halaman Lampiran.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mengacu kepada Permen Bappenas no 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025, Pergub Jawa Barat no 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 serta SE Bupati nomor 050/SE.04- Bappeda tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Arah kebijakan pembangunan pertanian sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2025 secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;
2. Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian;
4. Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya;
5. Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional;
6. Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara *holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya;
7. Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk *start-up* untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat

- struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan;
8. Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta
 9. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal;
 10. Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan;
 11. Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta
 12. Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat yang tercantum pada Pergub Jawa Barat no 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan
2. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian
3. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani
4. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan
5. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
6. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
7. Peningkatan perhutanan sosial

8. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan
9. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal
10. Pengembangan *Smart Fishing* dan *Sustainable Aquaculture*.

Serta Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 dengan Tema “**Peningkatan Daya Saing Daerah**” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

Arah Kebijakan tersebut secara berkesinambungan menjadi input dalam penentuan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran untuk percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Pangandaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan
 - 1) Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
2. Sasaran
 - 1) Meningkatnya Produksi Pertanian



- 2) Meningkatnya Pengetahuan Sikap dan Keterampilan Petani
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (milyar rupiah)			1.872,62
			Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura (%)	2
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	2
			Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani (%)	10
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP			76,25 -81,00
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP	76,25 -81,00



3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran mempunyai program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Usulan Program Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	27	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi



URUSAN/UNSUR	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa



Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dan prakiraan maju 2026 secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.33.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Ada 2 (dua) rincian kategori program/kegiatan Dinas Pertanian berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, yaitu :

1. Program/Kegiatan Prioritas

Program/Kegiatan Prioritas adalah program/kegiatan yang diprioritaskan pelaksanaan dan penganggarnya dalam rangka pencapaian visi dan misi, bersifat mendesak, harus selesai pada tahun rencana, target capaian harus terukur pada skala maksimal atau ideal, dengan cakupan wilayah yang luas, kegiatan melibatkan sebagian besar masyarakat dan atau berdampak luas pada masyarakat, serta membentuk pencitraan positif bagi keberhasilan program pembangunan tersebut.

Adapun rincian program/kegiatan prioritas urusan pertanian berdasarkan



RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp650.000.000 hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Indeks Pertanaman, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang diimplementasikan kedalam kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan jumlah anggaran yang diimplementasikan kedalam sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi sebanyak satu laporan.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp2.327.700.400 hasil yang ingin dicapai adalah peningkatan penyediaan prasarana pertanian yang diimplementasikan kedalam dua kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Pengembangan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp1.027.700.400 yang diimplementasikan kedalam sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya sebanyak dua laporan.
 2. Pembangunan Prasarana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp1.300.000.000 yang diimplementasikan kedalam sub Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 unit jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan jumlah anggaran Rp50.000.000 hasil yang ingin dicapai adalah 10% bahan pangan asal hewan yang asuh & peningkatan pencegahan penyakit menular ternak yang diimplementasikan kedalam kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan kedalam sub kegiatan Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya keluaran dari kegiatan ini adalah laporan analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan jumlah anggaran Rp100.000.000 hasil yang ingin dicapai adalah Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar 72% yang diimplementasikan kedalam kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Pertanian Kabupaten/Kota yang diimplementasikan kedalam subkegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan keluaran dari sub kegiatan ini adalah 500 ha pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan jumlah anggaran Rp50.000.000 hasil yang ingin dicapai adalah Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani yang diimplementasikan kedalam kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian yang dijabarkan kedalam sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah 112 unit kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya;

2. Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan)

Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan) adalah kegiatan yang pelaksanaan dan penyelenggaraannya wajib dan bersifat rutin berulang setiap tahun, dengan maksud, tujuan, volume, anggaran dan output relatif tetap atau sama, yang apabila tidak dianggarkan berdampak eksistensial pada organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Program/kegiatan ini merupakan dasar dari organisasi perangkat daerah untuk melakukan semua kegiatan dasar yang menunjang keberlangsungan organisasi.

Adapun rincian Program/Kegiatan Rutin (Non Urusan) Dinas Pertanian berdasarkan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp7.473.889.000 hasil dari program ini adalah 90% perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, 90% laporan keuangan dengan kualitas baik, 20% sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 90% peningkatan kompetensi aparatur yang diimplementasikan ke dalam 5 kegiatan yaitu sebagai berikut :
 1. Administrasi Keuangan dengan jumlah anggaran Rp6.611.078.462 yang dijabarkan kedalam sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN keluaran dari sub kegiatan ini adalah 65 orang/bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran Rp29.995.775 yang dijabarkan kedalam sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp120.000.000 yang dijabarkan kedalam sub



kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp663.472.000 yang dijabarkan kedalam dua sub kegiatan yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran Rp70.000.000 keluaran dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah anggaran Rp593.472.000 keluaran dari sub kegiatan ini adalah 12 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran Rp49.342.763 yang dijabarkan kedalam sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan keluaran dari sub kegiatan ini adalah 5 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD tahunan daerah yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2025. Arah kebijakan Dinas pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dapat menjabarkan dan mensinkronisasikan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Melalui Rencana Kerja Dinas Pertanian, diharapkan seluruh target yang akan dicapai pada tahun 2025 dapat secara optimal tercapai, sehingga Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian secara bertahap mulai terwujud. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran serta peran aktif stake holder yang bersangkutan.

Kepala Dinas,



YADI GUNAWAN, S.Hut.,MM

NIP. 19750518 200901 1 003



LAMPIRAN

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program,kegiatan dan subkegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	100,00
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	53,00	16,00	8,00	8,00	100,00	8,00	32,00	60,38
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	42,00	14,00	7,00	7,00	100,00	7,00	28,00	66,67
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	30,00	10,00	5,00	5,00	100,00	5,00	20,00	66,67
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	20,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	95,00	71,00	75,00	75,00	100,00	85,00	85,00	89,47
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Keuangan SKPD	dokumen	72,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	66,67
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	33,33
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	16,67
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	72,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	66,67
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	60,00	24,00	12,00	12,00	100,00	12,00	48,00	80,00
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	80,00
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	22,22
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6,00	2,00	1,00	2,00	200,00	1,00	5,00	83,33
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	18,00	4,00	1,00	1,00	100,00	3,00	8,00	44,44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program,kegiatan dan subkegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	1661,00	377,00	160,00	160,00	100,00	280,00	817,00	49,19
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	560,00	16,00	10,00	10,00	100,00	100,00	126,00	22,50
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	24,00	4,00	2,00	2,00	100,00	4,00	10,00	41,67
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	99,00	10,00	1,00	1,00	100,00	22,00	33,00	33,33
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	29,09
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	38,00	94,00	0,00	0,00	0,00	5,00	99,00	260,53
3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,67
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	10,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	40,00
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	24,00	4,00	12,00	12,00	100,00	4,00	20,00	83,33
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	72,00	2,00	12,00	12,00	100,00	12,00	26,00	36,11
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	72,00	2,00	12,00	12,00	100,00	12,00	26,00	36,11
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	109,00	20,00	9,00	9,00	100,00	22,00	51,00	46,79
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	23,00	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	69,57
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	86,00	35,00	5,00	5,00	100,00	18,00	58,00	67,44
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	200 Indeks	200,00	208,00	200,00	117,13	58,57	200,00	200,00	100,00
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	3,00	74,01	3,00	-10,87	-362,33	3,00	3,00	100,00
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	2,30	15,17	1,30	-8,21	-631,54	1,60	1,60	69,57
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	%	2,00	110,14	1,20	115,26	9605,00	1,50	1,50	75,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	dokumen	5,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	60,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	5,00	2,00	2,00	1,00	50,00	1,00	4,00	80,00
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	3,00	0,00	5,00	3,00	60,00	3,00	6,00	200,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	66,67
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	40,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	14,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	35,71
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasa Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana Skala Kecil	laporan	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	588,00	110,00	525,00	645,00	122,86	800,00	1555,00	264,46
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	588,00	110,00	525,00	645,00	122,86	800,00	1555,00	264,46

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program,kegiatan dan subkegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	%	3,00	14,70	1,20	-33,87	-2822,58	1,50	1,50	50,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	dokumen	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	80,00
3.27.03.2.01.0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	80,00
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	dokumen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	unit	75,00	45,00	13,00	25,00	192,31	6,00	76,00	101,33
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	17,00	7,00	10,00	22,00	220,00	5,00	34,00	200,00
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.27.03.2.02.0007	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	29,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	27,59
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	29,00	16,00	3,00	3,00	100,00	83,00	102,00	351,72
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	unit	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	ha	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	%	10,00	0,00	10,00	20,11	201,10	10,00	30,11	301,10
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	laporan	5,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	40,00
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	laporan	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	12,50
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	laporan	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Jasa Medik Veteriner	dokumen	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	0,00
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	0,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	60,00	0,00	65,00	17,54	26,99	70,00	70,00	116,67
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	ha	300,00	0,00	300,00	959,00	319,67	500,00	500,00	166,67
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	ha	300,00	0,00	300,00	534,00	178,00	500,00	500,00	166,67
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	300,00	0,00	300,00	425,00	141,67	500,00	500,00	166,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program,kegiatan dan subkegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator Kinerja	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	%	10,00	11,11	10,00	12,65	126,50	10,00	33,76	337,60
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik	unit	672,00	112,00	112,00	112,00	100,00	112,00	336,00	50,00
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10,00	1,00	10,00	10,00	100,00	10,00	21,00	210,00
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	672,00	2,00	112,00	112,00	100,00	112,00	226,00	33,63
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	0,00	20,00	39,00	10,00	25,64	0,00	30,00	0,00
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	25,00

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Pangandaran

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1))	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton/Ha)		✓					6,24	6,24	6,24	6,24	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
2	Jumlah Sarana Alat Pertanian (Unit)		✓					134	134	134	134	Realisasi tahun 2023 masih merupakan proyeksi
3	Jumlah Prasarana Yang Dibangun (Unit)		✓					41	41	41	41	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
4	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Menular (%)		✓					-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	
5	Luas Areal Lahan Terdampak Bencana Yang Tertanggulangi (Ha)		✓					959	959	959	959	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
6	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian (Buah)		✓					419	419	419	419	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
7	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura (%)			1,20	1,50	2,00	2,00	115,26	1,50	2,00	2,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
8	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)			3,00	3,00	3,00	3,00	-10,87	3,00	3,00	3,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
9	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)			1,30	1,60	2,00	2,30	-8,21	1,60	2,00	2,30	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
10	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani (%)			10,00	10,00	10,00	10,00	12,65	10,00	10,00	10,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
11	Nilai SAKIP Dinas Pertanian			69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	70,30	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
12	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik (%)			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1))	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	Persentase peningkatan kompetensi aparatur (%)			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
14	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas (%)			90,00	90,00	90,00	20,00	90,00	90,00	90,00	20,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
15	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi (%)			20,00	20,00	20,00	90,00	20,00	20,00	20,00	90,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
16	Indeks Pertanaman (Indeks)			200,00	200,00	200,00	200,00	117,13	200,00	200,00	200,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
17	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan (%)			3,00	3,00	3,00	3,00	- 10,87	3,00	3,00	3,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
18	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)			1,30	1,60	2,00	2,00	- 8,21	1,60	2,00	2,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
19	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura (%)			1,20	1,50	2,00	2,30	115,26	1,50	2,00	2,30	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
20	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian (%)			1,20	1,50	2,00	2,00	- 33,87	1,50	2,00	2,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
21	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (%)			10,00	10,00	10,00	10,00	20,11	10,00	10,00	10,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
22	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)			65,00	70,00	72,00	75,00	17,54	70,00	72,00	75,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
23	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan (%)			100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi
24	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani (%)			10,00	10,00	10,00	10,00	12,65	10,00	10,00	10,00	Realisasi tahun 2024 masih merupakan proyeksi

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Dinas Pertanian

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 % 90 % 90 % 20 %	9.896.442.393	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90 % 90 % 90 % 20 %	7.473.889.000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	285.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dokumen	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	85.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	8.239.594.393	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	6.611.078.462	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	8.160.409.393	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	6.611.078.462	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	69.185.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	40.906.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 dokume n	-	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	40.906.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	138.920.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 dokume n	-	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	33.920.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	-	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	55.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	o dokumen	-	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	303.212.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.995.775	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.655.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	95.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.995.775	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	-	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	280 Dokumen	28.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	-	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	-	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	33.557.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 dokumen	-	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 unit	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	120.000.000	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	170.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	442.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	663.472.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	308.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	593.472.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Unit	146.410.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Unit	49.342.763	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	133.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	49.342.763	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	13.310.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pangandaran , Parigi, Karangbenda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Indeks Pertanaman Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	200 Indeks 3 % 2,0 % 2,3 %	1.820.015.255	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Indeks Pertanaman Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	200 Indeks 3 % 2,0 % 2,3 %	650.000.000	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 dokumen	200.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 dokumen	650.000.000	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	100.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	650.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	100.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	-	
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.070.015.255	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	-	
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	100.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0 dokumen	-	
2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	970.015.255	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 dokumen	-	
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 dokumen	-	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	50.000.000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 Laporan	-	
4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 ekor	500.000.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 ekor	-	
1	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 Ekor	500.000.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 ekor	-	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	2 %	4.563.590.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	2 %	2.327.700.400	
1	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	1 dokumen	1.393.590.000	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	1 dokumen	1.027.700.400	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	700.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B di Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	0 dokumen	-	
2	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	693.590.000	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 dokumen	-	
3						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Pangandaran , Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1.027.700.400	
2	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	14 unit	3.070.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	1.300.000.000	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	800.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	-	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1.270.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	-	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	5 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1.300.000.000	
3	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Jumlah Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	1 ha	100.000.000	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum		Jumlah Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	1 ha	-	
1	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	1 Ha	100.000.000	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	1 Ha		
4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	10 %	486.054.720	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	10 %	50.000.000	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	450.000.000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokume n	-	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	150.000.000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan		
2	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	300.000.000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan		
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	36.054.720	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
1	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	36.054.720	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan	50.000.000	
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	72 %	800.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	72 %	100.000.000	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	500 ha	800.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	500 ha	100.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	500.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	100.000.000	
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha	300.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha		
6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	100 %	50.000.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	0%	-	
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 dokumen	-	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	50.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	0 Laporan		
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	10 %	1.172.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	10 %	50.000.000	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik	112 unit	1.172.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik	112 unit	50.000.000	

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit		
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	112 Unit	693.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	112 Unit	50.000.000	
3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	279.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit		
					18.788.102.368					10.651.589.400	

TABEL T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Hegarmah Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya, Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Km	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Cintakarya RT 01 RW 01 Desa Cisarua Kecamatan Langkaplanc ar, Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	600 m	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Babakan Dusun Cilele RT/RW 29/08 Desa Cimerak Kecamatan Cimerak, Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	600 m	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Cikiray RT 06 RW 06 Desa Cisarua Kecamatan Langkaplanc ar, Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	600 m	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Pagadungan RT. 011 RW. 006, Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Nagrak RT.07/04 Desa Karangsari , Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Sindangjaya Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran , Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Cisagu RT.04 RW.04, Kab. Pangandaran	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dusun Gerendong RT.033 RW.005, Kab. Pangandaran	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 paket	-
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dusun Cigintung Rt 01 Rw 01 Blok saluran Bojongkulur , Kab. Pangandaran	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 paket	
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Blok Gunung Erang Dusun Cintamukti, Kab. Pangandaran	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 paket	
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Blok Cibanen Dusun Sukasari, Kab. Pangandaran	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 paket	
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Margacinta, Kab. Pangandaran	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Paket	-
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DUSUN CITELU RT RT 04 RW 01, Kab. Pangandaran	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Dusun Karangkama 1 Rt. 001 Rw. 006, Kab. Pangandaran	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Paket	-
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Dusun Gerendong RT.036 RW.005 Desa Mangunjaya , Kab. Pangandaran	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 paket	
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Desa Jangraga, Kab. Pangandaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14 unit	-

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERTANIAN				10.651.589.400				12.087.890.896
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.651.589.400				12.087.890.896
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.651.589.400				12.087.890.896
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, Persentase Peningkatan kompetensi aparatur		90% 90% 20% 90%	7.473.889.000			90% 90% 20% 90%	9.407.290.628
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6.611.078.462			1 Dokumen	8.364.419.628
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		6.611.078.462	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	8.364.419.628

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Dokumen	29.995.775			1 Dokumen	124.448.500
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda		29.995.775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-	124.448.500
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Unit	120.000.000			1 Unit	241.576.500
3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	1 Unit	120.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	241.576.500
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Dokumen	663.472.000			1 Dokumen	530.436.000
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	12 Laporan	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	177.928.000
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	12 Laporan	593.472.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	352.508.000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5 Unit	49.342.763			5 Unit	146.410.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	5 Unit	49.342.763	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	146.410.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura		200 Indeks 3 % 2,0 % 2,0 %	650.000.000			200 Indeks 3 % 2,0 % 2,0 %	200.000.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		1 dokumen	650.000.000			1 dokumen	200.000.000
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	650.000.000	DAK NONFISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		1 Laporan	200.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian		2 %	2.327.700.400			2 %	1.250.000.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian		1 dokumen	1.027.700.400			1 dokumen	250.000.000
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.027.700.400	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTAN AN-DANA REBOISASI (DR)		2 Laporan	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian		1 Unit	1.300.000.000			1 Unit	1.000.000.000
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	1 Unit	1.300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		1 Unit	1.000.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak		10 %	50.000.000			10 %	37.600.268
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	37.600.268
3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37.600.268
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		72 %	100.000.000			72 %	500.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		500 ha	100.000.000			300 ha	500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 ha	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500 ha	500.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani		10 %	50.000.000			10 %	693.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik		112 unit	50.000.000			112 unit	693.000.000
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		112 Unit	693.000.000
J U M L A H					10.651.589.400			-	12.087.890.896